

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan Kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Watoone adalah sebagai berikut:

1. kemitraan BPD dan Kepala desa dalam menjalankan fungsi legislasi, bpd Dan Kepala Desa telah melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi. kerjasama BPD dan Kepala Desa dalam membahas dan menetapkan peraturan desa Watoone terkait aspek kepentingan bersama menghasilkan 2 peraturan desa yaitu perdes APBDes dan perdes RKPDes. Dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa pembuatan peraturan desa yang mengedepankan aspek kebutuhan yang dipandang menjadi kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan desa dalam keterlibatannya pada pembuatan peraturan desa. BPD serta Kepala Desa telah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Watoone.
2. Kemitraan BPD dan Kepala Desa dalam membahas rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, bahwa pembangunan fisik desa tidak berjalan lancar karena tindakan Kepala Desa Watoone dalam membuat keputusan untuk melaksanakan pembangunan sebagai penjabaran RPJMDesa tidak melibatkan BPD. Dampak lainnya adalah timbul ketegangan antara kepala desa dan BPD serta bekurangnya legitimasi keputusan yang diambil. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan diantara anggota BPD dan masyarakat karena tidak

dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan seluruh pihak yang terkait.

6.2 Saran

Beranjak dari kesimpulan peneliti tentang kemitraan antara BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Maka Peneliti menyarankan:

1. Bagi Kepala Desa diharapkan saat membuat keputusan harus melibatkan BPD. Kepala Desa harus memahami dan mematuhi regulasi yang mengatur pemerintahan desa, termasuk peran dan fungsi BPD. Semua keputusan penting harus dibahas dan disepakati bersama BPD.
2. Kerjasama dalam musyawarah desa sudah baik mohon ditingkatkan terus dan perlu diadakannya juga musyawarah dusun untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat.